

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pemandangan sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, apalagi dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Bagi perusahaan untuk menjalankan suatu bisnis perlunya perpindahan kesuatu tempat untuk menjalankan kehidupannya. Dalam menjalani kehidupan, perusahaan membutuhkan alat transportasi berupa kendaraan bermotor.

Pada pembangunan ekonomi yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang menjadi salah satu upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur yang berdasarkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut ketersediaan alokasi dana yang tidak sedikit.¹ Dalam era modern ini banyak pemerintahan, masyarakat maupun badan perseorangan juga membutuhkan alat transportasi dalam melakukan kehidupan sehari-hari maupun menjalankan sebuah bisnis di perusahaan, dalam merintis sebuah perusahaan membutuhkan lembaga yang dapat membiayai modal usaha tersebut. Diperlukan biaya yang tidaklah sedikit dan memerlukan prasarana yang juga tidak sedikit. Oleh karena itu banyak pelaku usaha yang menggunakan lembaga pembiayaan berkaitan dengan

¹ Sari, Karina Ari Soka. "Akibat Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Lessee dalam Perjanjian Leasing (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt. G/2018/PN-Plk)."

permodalan dan Pengadaan barang untuk tabungan kredit usaha atau modal usaha, seperti pembiayaan kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil.²

Bank adalah lembaga keuangan terpenting yang mempengaruhi perekonomian. Fungsinya sebagai perantara keuangan antara mereka yang memiliki surplus dan mereka yang membutuhkan modal atau memiliki defisit. Perbedaan antara lembaga pembiayaan dengan Bank adalah Bank menerima dana secara langsung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak menerima dana secara langsung dari masyarakat. Salah satu lembaga keuangan dengan pertumbuhan tercepat saat ini adalah pembiayaan kredit konsumen yang dipergunakan untuk membantu masyarakat dalam permodalan dan pengadaan barang secara kredit³

Lembaga pembiayaan adalah salah suatu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank, yang secara khusus didirikan untuk melakukan persewaan pembiayaan konsumen (*consumer finance*), atau usaha kartu kredit (*credit card*), yang mempunyai peranan sangat penting dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁴ Untuk pembiayaan peminjaman modal secara kredit kendaraan khususnya roda empat untuk memberikan solusi kepada pelaku konsumen. Dikarenakan dalam membeli sebuah kendaraan sangat tidak terjangkau jika harus dibeli dengan cash atau kontan apalagi yang dibeli dalam jumlah tidak hanya satu (1) kendaraan, sehingga

² Kairupan, A. G. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pada Bisnis Modern Pada Era Global. *Lex Et Societatis*, 5(3), hlm, 126.

³ Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

⁴ Racmat, B. (2002). *Multi Finance Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm, 1.

untuk mengatasi masalah muncullah lembaga pembiayaan untuk mengatasi dalam peminjaman modal sebuah kendaraan roda empat maupun pembayaran berkala karena ingin memiliki suatu kendaraan khususnya roda empat (4) yang memiliki harga cukup tinggi untuk dibeli secara cash atau tunai.

Lembaga pembiayaan dalam hal ini adalah PT.JTRUST OLMPINDO MULTI FINANCE diatur dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 dan Keppres Indonesia Nomor 61 Tahun 1988. Untuk perizinan suatu pembiayaan dalam mengatasi pinjaman modal secara berkala itu sendiri diatur dalam surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep-122/MK/2/1974/,No.32/M/SK/2/1974 dan No. 30/KPB/1/74/ tanggal 7 Februari 1974 “Perijinan Usaha Leasing”. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam kitab undang-undang Hukum perdata. Dalam pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Sebenarnya yang dimaksud pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang, akan tetapi oleh karena buku III Kitab undang-undang hukum perdata yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah dengan dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam praktiknya untuk mengadakan perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat

hal-hal yang tidak ditentukan, maka kembali lagi atau tunduk pada ketentuan Undang-undang.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas. Namun demikian suatu pembiayaan konsumen sebenarnya secara substantif sama dengan kredit konsumtif yang memiliki arti yaitu:

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang- konsumen dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa: maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. (A.Abdurrahman, 1991 : 242) ⁵

Bentuk Perjanjian antara lembaga pembiayaan dan konsumen yang sering terjadi adalah dalam bentuk perjanjian kredit kendaraan roda empat (4), lembaga pembiayaan memberikan jasa kepada masyarakat terkait pembayaran harga kendaraan yang dibeli konsumen secara tunai, dalam hal ini antara lembaga pembiayaan dan konsumen terkait perjanjian pembiayaan kredit (Setiono, 2018). Dalam perjanjian antara lembaga dan konsumen tersebut, lembaga pembiayaan akan menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen untuk pembayaran barang yang membelinya, dan pihak konsumen

⁵Fuady, M. (1999). *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 162

akan membayar pinjaman yang diberikan secara angsuran kredit kendaraan roda empat (4) kepada lembaga pembiayaan tersebut.⁶

Sebagai konsumen adanya lembaga keuangan ini dapat menjadi pilihan yang baik, karena di era sekarang sangat susah mencari dan untuk jangka menengah dan panjang. Dalam hal ini konsumen menggunakan cara peminjaman untuk mendapatkan pembiayaan agar bisa membantu membiayai kendaraan roda empat (4) dan melakukan pengembalian dalam jangka waktu antara tiga sampai lima tahun bahkan lebih.⁷ Manfaatnya sebagai lembaga pembiayaan yang diberikan oleh konsumen sangat membantu dalam meringankan para pelaku guna untuk memiliki sebuah kendaraan roda empat (4) tidak memiliki modal besar untuk membeli secara kontan atau tunai

Demikian pula dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan kredit konsumen. Lembaga pembiayaan pihak yang memberikan suatu pinjaman kepada konsumen kemungkinan akan muncul atau adanya timbul masalah yang menyertai atau hambatan dan ada pula masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian peminjaman modal usaha antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan yaitu penunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen.

Salah satu lembaga pembiayaan adalah PT.JTRUST OLMPINDO MULTI FINANCE sebagai lembaga Pembiayaan Kredit konsumen Kegiatan usaha pembiayaan yang disediakan Perseroan khususnya; pembiayaan

⁶ Setiono, G. C., & Sulisty, H. (2021). CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA. *Transparansi Hukum*, 4(1), hlm. 63

⁷ Lasmanah, *Leasing Sebagai Alternatif Pendanaan Perusahaan Sebagai Penunjang Perekonomian*, Fokus, Jurnal Akutansi Dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung, Vol. 2, No. 1, Agustus 2000, hlm. 1

kendaraan roda empat baik kendaraan baru maupun bekas yang berasal dealer atau showroom mobil bekas, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk penunjang suatu usaha. Sehingga konsumen dapat mendapatkan kredit dalam pelaksanaan PT. JTRUST OLYMPINDO MULTI Finance ini tentunya harus melakukan perjanjian, dalam melakukan perjanjian maka disini tentunya kedua belah pihak itu menyepakati dalam melakukan pembiayaan kredit, dalam kata sepakat lahirlah suatu hubungan hukum dari hak dan kewajiban antara PT. JTRUST OLYMPINDO MULTI Finance dengan konsumen harus menaati atau wajib patuh dengan peraturan yang berlaku ketika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pembiayaan kredit ini atau kewajiban tidak terpenuhi maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu pihak yang melanggar peraturan-peraturan berlaku dalam pembiayaan kredit ini maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab ini dapat berlaku jika pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri jika terbukti bersalah maka dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri maka ia harus bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian berdasarkan keputusan hakim.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan untuk dapat dilakukan pembahasan adalah bagaimana kesesuaian bentuk dan isi perjanjiannya dengan peraturan yang mengatur. Maka dari itu berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk mengambil judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KREDIT ANTARA PT.JTRUST OLYMPINDO DENGAN KONSUMEN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan, penulis akan memfokuskan penulisan skripsi ini terfokus pada tanggung jawab hukum dalam pembiayaan Kredit antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan perusahaan pembiayaan dengan konsumen, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Perjanjian dalam Pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen ?
2. Bagaimana Peraturan berserta hak dan kewajiban dalam Pembiayaan Kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI dengan konsumen ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar peraturan yang berlaku pada pembiayaan kendaraan roda empat (4)?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas memiliki tujuan-tujuan khusus yang di targetkan. Dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Perjanjian dalam Pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan perusahaan pembiayaan dengan konsumen.

2. Untuk mengetahui Peraturan beserta hak dan kewajiban dalam Pembiayaan Kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI dengan konsumen.
3. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar peraturan yang berlaku pada pembiayaan kendaraan roda empat (4).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah seperti diatas, penelitian terhadap tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance, diharapkan dapat memberikan manfaat yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan bagi penulis terutama terhadap tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen.

2. Bagi Ilmu Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap ilmu pengetahuan dalam hukum perdata terkait perjanjian pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance serta dapat dijadikan acuan literatur dalam mendapatkan informasi terkait terhadap tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman umum terhadap masyarakat luas serta meningkatkan peran terkait prosedur maupun tata cara mengenai tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan beberapa langkah dalam suatu penelitian ilmiah yang berawal dari menentukan topik penelitian, mengumpulkan serta melakukan analisis data yang kemudian dapat menghasilkan pemahaman atas topik terhadap isu tertentu. Langkah ini berlangsung sesuai tahapan prosedur penelitian ini yang perlu dilakukan untuk melangkah pada tahap selanjutnya. Dalam hal ini, untuk melakukan pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yakni metode penelitian hukum terkait pemberlakuan atau penetapan hukum normatif yang dilakukan secara in action pada setiap kejadian hukum yang terjadi didalam masyarakat.⁸ Metode pendekatan ini merupakan dari data-data sekunder berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur/ buku terkait perjanjian pembiayaan kredit yang ditunjang oleh penelitian lapang melalui wawancara. Data-data tersebut diperoleh dari

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 134

para responden melalui penelitian lapangan yaitu para pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance yang berkompeten.

Dengan metode pendekatan ini, maka penulis dalam hal ini yang diteliti adalah hubungan hukum, kaidah hukum, asas-asas hukum, serta tanggung jawab hukum terkait dalam pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) yang dituangkan dalam kesimpulan-kesimpulan untuk memahami dan memberi jawaban atas permasalahan mengenai tanggung jawab hukum antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen. Sehingga dapat diketahui legalitas dalam tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif. Deskriptif dalam hal ini penelitian menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data yang diperoleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan data-data sekunder dengan bahan-bahan Hukum yang meliputi bahan hukum Primer maupun bahan Sekunder.⁹

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan untuk penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- c. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur dari buku-buku, penelitian-penelitian sebelumnya, serta tulisan-tulisan yang berkaitan tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen.

⁹ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, Hlm. 8

b. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data primer yang didapatkan dari wawancara serta akta perjanjian ialah sebagai berikut:

1) Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di PT. JTRUST OLMPINDO Multi Finance di Surakarta sesuai dengan penyusunan penelitian oleh penulis untuk memperoleh data.

2) Subyek penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan subyek-subyek yang berkompeten untuk diteliti yaitu pihak yang terkait pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan kredit antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Metode yang digunakan dengan tahapan mengumpulkan data, menghimpun data, dan mempelajari baik meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan tesier yang berkaitan tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit

b) Studi Lapangan

Studi Lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung terhadap obyek dalam memperoleh data primer sebagai berikut :

1) Menyusun Daftar Pertanyaan

Dalam hal ini penulis pertama kali menyusun daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI FINANCE yang berkompeten dalam hal bidangnya, sehingga dapat menghasilkan jawaban dalam penelitian ini .

2) Wawancara

Penulis ini selanjutnya melakukan tahap memperoleh keterangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung bersama pihak-pihak PT. JTRUST OLMPINDO MULTI FINANCE, dalam hal ini penulis bertujuan untuk memperoleh data data dari narasumber dan dapat memahami permasalahan yang akan diteliti, dalam tahap ini penulis melakukan wawancara dengan bapak harold selaku penanggung jawab bidang head collection di PT. JTRUST OLMPINDO MULTI FINANCE di Surakarta

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis ialah metode analisis data secara kualitatif yaitu suatu metode dimana penulis dapat melakukan analisis data sekunder berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan serta literatur-literatur lain yang kaitannya dengan tanggung jawab hokum dalam pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4). Selanjutnya data tersebut ditunjang dengan data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya dan dapat dianalisis secara kualitatif beserta dicari pemecahannya, sehingga dapat menghasilkan data yang tersusun secara

sistematis dan dijelaskan secara deskriptif. Hal ini bertujuan, agar penulis memperoleh jawaban atas permasalahan terkait tanggung jawab hukum dalam pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4) antara PT. JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan konsumen dengan konsumen serta dibuat kesimpulan-kesimpulan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman skripsi maka penulis ini akan membagikan tulisan dalam empat bagian. Yang mana antara bab satu dengan lainnya ditulis secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab akan dibahas persub pembahasan. Untuk lebih rinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Kendaraan Bermotor Roda Empat (4)
- B. Pengertian Pembiayaan Kredit
- C. Pengertian PT.JTRUST OLMPINDO MULTI Finance
- D. Pengertian perjanjian kredit

- E. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Dalam Pembiayaan Kredit
- F. Pihak-Pihak dalam Pelaksanaan Pembiayaan Kredit
- G. Perjanjian Antara PT.JTRUST OLMPINDO MULTI Finance dengan Konsumen dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat (4)
- H. Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Roda Empat (4)
- I. Hak dan Kewajiban Antara PT.JTRUST OLMPINDO MULTI Finance Dengan Konsumen
- J. Peraturan yang berlaku dalam pembiayaan kredit kendaraan roda empat (4)
- K. Tanggung jawab hukum pembiayaan kredit
 - 1. Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi
 - 2. Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum
- L. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat (4)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA